

NAHDLATUL ULAMA MEMBERDAYAKAN EKONOMI JAMA'AH

Akhmad Miftah
Pengurus PP Lakpesdam NU

Berbicara pemberdayaan ekonomi tentu harus berbicara soal politik ekonomi yang menjadi pilihan negara dan bagaimana *political will* pemerintah dalam melindungi rakyatnya di era globalisasi saat ini sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan negara. Tanpa menyoal hal tersebut, program-program pemberdayaan ekonomi akan terjebak pada proyek yang sifatnya karitas belaka. Proyek yang sifatnya karitas ini biasanya berjalan cukup baik pada durasi program, tapi saat durasi program usai, bubar pula kegiatan ekonomi yang dikembangkan. Atau kalau pun terus berlanjut, ada pihak lain yang akan lebih menikmati keuntungan ekonomis dari program pemberdayaan ekonomi tersebut.

Jika kita lihat proses pembangunan yang dikembangkan Indonesia selama lebih dari 40 tahun yang lalu, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi mendapat prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi itu juga dikawal oleh birokrasi negara yang cenderung represif. Sayang-



nya, program pertumbuhan ekonominya tidak secara langsung menjawab tantangan utama bangsa, yaitu pemberantasan kemiskinan. Malah sebaliknya, kian menumbuhkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Pilihan strategi pemerintah ini yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan kurang memberi ruang dan kesempatan bagi rakyat untuk dapat berkembang. Dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, pola pembangunan yang mengejar pertumbuhan dengan tanpa memperhatikan pemerataan telah menciptakan dikotomi antara industri dan sektor pertanian, serta dikotomi antara kota dan desa. Karena sektor industri yang padat modal dianggap memberi kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan dari pada sektor pertanian yang padat karya. Proses ini telah memperlemah sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar bangsa Indonesia.

Buruknya nilai tukar produk-produk pertanian dan makin meningkatnya ongkos produksi menjadikan nilai tambah dari sektor ini relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor industri. Sehingga untuk menopang kehidupan yang semakin diwarnai konsumsi barang-barang industri itu semakin sulit. Di sisi lain, persoalan tanah tidak mendapat perhatian secara serius. Malah tanah dijadikan komoditas komersial yang diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan sehingga tata guna tanah diabaikan. Misalnya, tanah yang subur digunakan untuk lapangan golf, lahan industri, atau perumahan. Selain itu, kepemilikan tanah yang timpang di mana tanah-tanah pertanian tidak lagi dimiliki oleh petani tetapi dimiliki oleh kaum kota yang diperoleh melalui pembelian wajar maupun dengan proses yang lain.

Di sisi lain, serbuan produk-produk industri ke pelosok desa demikian hebatnya sehingga telah mengubah perilaku masyarakat desa untuk hidup lebih konsumtif, dengan mengkonsumsi produk-produk industri yang menawarkan barang yang lebih praktis, mudah dan tidak perlu susah payah. Semua itu dicitrakan sebagai modern. Bahkan pengerukan uang di desa dilakukan dengan lebih hebat, yaitu dengan kehadiran gerai-gerai berlabel nasional, bahkan multi nasional. Lalu keuntungan apa yang bisa diperoleh masyarakat desa melalui gerai-gerai itu? Dengan kondisi yang demikian dunia pertanian bagi kaum petani dan miskin desa dianggap sudah tidak bisa

memenuhi kebutuhan hidup yang terus bergeser pada barang-barang industri.

Kehidupan desa juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah yang lebih tinggi, segala potensi yang ada di desa akan dipakai untuk pembangunan kota/industri, sedangkan masyarakat desa tidak mendapat keuntungan apapun dari proses tersebut.

Proses ini, sebagian kalangan menyebutkan sebagai proses 'pemiskinan' berjalan dengan baik tanpa ada keberanian dari rakyat untuk mengoreksinya karena trauma masa lalu. Karena proses ini juga telah menyebabkan desa tidak bisa lagi menyejahterakan rakyatnya sehingga tidak mengherankan jika wajah desa adalah wajah anak-anak dan orang tua. Sedangkan wajah-wajah usia produktif: laki-laki dan perempuan tidak terlihat karena mereka berduyun-duyun menyerbu pusat-pusat pertumbuhan di kota-kota dan luar negeri.

Paradigma pembangunan tersebut telah menyebabkan adanya pemusatan kekuasaan oleh sekelompok kecil masyarakat yaitu pemodal, baik pribumi maupun asing. Sehingga proses ini menimbulkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa, karena sebagian besar kekayaan bangsa akan dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian kecil kekayaan akan dikuasai oleh sebagian besar masyarakat.

Di sisi lain, globalisasi yang didefinisikan sebagai perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang-barang dan jasa-jasa

termasuk tenaga kerja, modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan barang dan jasa tidak mungkin untuk dihindari. Namun, dalam menghadapi arus globalisasi ini sikap orang berbeda-beda, sebagian menganggap bahwa arus globalisasi adalah sebuah peluang karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagian lagi menganggap globalisasi sebagai ancaman. Sebab, arus globalisasi tersebut pada hakikatnya adalah gerakan kapitalisme internasional, yaitu negara-negara sedang berkembang dijadikan sebagai ladang investasi kapitalis internasional yang berlindung dalam negara-negara industri maju. Kalau kedua pendapat tersebut kita sinkronkan, maka kalau memang benar globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus juga meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam negara sedang berkembang dan meningkatkan ketergantungan negara sedang berkembang pada negara industri maju.

Dalam menghadapi arus globalisasi tersebut, sikap pemerintah terkesan mempermudah dan membuka lebar pintu untuk investasi asing dan masuknya barang-barang luar negeri tanpa melindungi produk-produk dalam negeri. Kita bisa periksa misalnya dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, negara memberi keleluasaan asing untuk menguasai tanah selama 90 tahun dan dapat diperpanjang 45 tahun sehingga total menjadi 135 tahun. Ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang cukup untuk hidup 3 gen-

erasi mereka. Air yang menjadi hajat kehidupan mestinya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya. Begitu pula serbuan produk-produk pertanian asing (yang *nota bene* mendapat subsidi negaranya) dengan mudah kita dapatkan di pasar modern. Pasar tradisional bahkan berada di pinggir-pinggir jalan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal mulai lesu karena serbuan produk yang sama dari luar negeri yang lebih bersaing.

Paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan arus globalisasi serta negara tidak berdaya melindungi rakyatnya dianggap telah melestarikan proses pemiskinan dan eksploitasi yang sistematis atau sistem ekonomi yang serakah.

Kondisi ini mengingatkan kita pada zaman Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, pasar dan sistem perdagangan di kota pada saat itu dikuasai dan dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Maju mundurnya masyarakat Madinah saat itu secara tidak langsung diatur oleh kapitalis Yahudi. Di dalam masyarakat terjadi penindasan, penzaliman dan praktik riba. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka selaku pemimpin, ia tidak bisa berdiam diri melihat kekacauan masyarakat Madinah yang bersumber pada eksploitasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Langkah yang diambilnya adalah meminta Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan, untuk membangun sistem ekonomi yang adil. Abdurrahman bin Auf memulai dengan

membangun pasar yang dikelola seratus persen oleh umat Islam sendiri dan berlokasi tidak jauh dari pasar Yahudi, yang kemudian diberi nama “*Suqul Anshar*” atau pasar Anshar. Semua orang Islam dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktifitas perdagangan di pasar itu tanpa bekerjasama sedikit pun dengan Yahudi dan tanpa terlibat dengan segala produk atau barang mereka. Dengan semangat perpaduan serta ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, umat Islam saat itu menumpukan perhatian semata-mata di *Suqul Anshar*. Bahkan bukan itu saja, karena dalam sistem ekonomi Islam tidak ada penindasan atau riba serta amat memberi kemudahan dan di dalamnya juga terdapat perpaduan semangat dan rasa bertuhan yang tajam, maka banyak orang bukan Islam dan orang luar kota pun tertarik untuk berdagang ke *Suqul Anshar*.

Hasil dari perjuangan itu, dalam waktu singkat ekonomi Madinah beralih ke tangan umat Islam. Sehingga ekonomi Yahudi yang sudah ratusan tahun, gulung tikar dan bangkrut, bahkan mereka menjadi miskin dan akhirnya menutup pasar mereka. Karena sebab itu juga maka sampai saat ini mereka sangat membenci dan dendam pada umat Islam dan sangat menginginkan umat Islam secara ekonomi berada dalam kekuasaan mereka tanpa umat Islam menyadarinya.

Dari uraian di atas, ada solusi yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan menghindari hegemoni pasar Yahudi dengan membangun pasar dan sistem

ekonomi yang berdasar dari, oleh, untuk kita dengan kesadaran penuh dan rasa bertuhan yang kuat merasuki kehidupan.

Kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai *jam’iyyah diniyyah* lahir setelah sebelumnya terkonsolidasi gerakan-gerakan yang dibangun para ulama. Dapat disebutkan bahwa ada tiga penyangga lahirnya NU, yaitu Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatut Tujjar. *Ketiga* penyangga inilah yang menguatkan NU kokoh berdiri sebelum era kemerdekaan. Konsolidasi politik yang dibangun melalui komunitas Nahdlatul Wathan, konsolidasi pemikiran dan gerakan dalam komunitas Tashwirul Afkar, dan konsolidasi ekonomi jama’ah melalui Nahdlatut Tujjar merupakan tiga prasyarat yang telah dipenuhi untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang kini menjadi besar.

Konsolidasi ekonomi jama’ah merupakan salah satu penyangga penting sebuah organisasi. Basis ekonomi yang kuat akan menopang bagi berlangsungnya kerja-kerja organisasi. Kemandirian organisasi dalam bidang ekonomi merupakan prasyarat bagi terbentuknya organisasi kuat yang memiliki daya tawar tinggi di hadapan kelompok lain.

Delapan tahun sebelum *jam’iyyah diniyyah* NU berdiri, Nahdlatut Tujjar dideklarasikan. Dalam deklarasi itu, K.H. Hasyim Asy’ari menegaskan: “*Wahai pemuda putera bangsa yang cerdas pandai dan para guru yang mulia. Mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan ekonomi yang beroperasi, di mana*

setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom." Ajakan untuk membangun badan usaha yang otonom ini didasarkan pada semangat membangun kemandirian ekonomi di hadapan kolonialisasi ekonomi yang dihadapi saat itu.

Dalam perjalanannya, semangat untuk membangun kekuatan ekonomi yang diinisiasi organisasi terus dilakukan. Pada tahun 1929 misalnya, di Surabaya yang berpusat di Pacarkeling didirikan *Cooperative Kaum Muslimin* (CKM). Pelopor pendiri perkumpulan usaha ini adalah K.H. Abdul Halim yang juga salah seorang pengurus HBNU saat itu. Pada tahun 1937, NU mendirikan sebuah koperasi yang bernama *syirkah mu'awwanah*. Model koperasi ini hingga kini masih terus dijalankan di beberapa cabang NU dengan menggandeng mitra-mitra strategisnya. Sementara Pada tahun 1990-an, melalui kebijakan Abdurrahman Wahid, NU membangun kerja sama dengan Bank Nusumma membentuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Nusumma.

Dalam konteks ini, kita layak melakukan refleksi, bagaimana sesungguhnya peran NU dalam pemberdayaan ekonomi jama'ahnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita merujuk kepada sistem ekonomi yang dicontohkan oleh Rasulullah di atas. Maka pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sudahkah bangunan sistem ekonomi yang dikembangkan NU mengarah kepada sistem yang tidak

eksploitatif, tidak serakah, dari, untuk, oleh umat, yang dibangun berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada pada umatnya.

Kalau kita lihat umat NU yang mayoritas berada di pedesaan sebagai petani maka persolan-persoalan yang dihadapi desa pada umumnya harus dicarikan jawabannya. Sudahkah NU membuat solusi yang berkaitan dengan persoalan pertanian? Bagaimana NU memikirkan persoalan tanah, tata niaga pertanian yang sangat tidak berkeadilan (di mana pada saat panen raya harga hasil pertanian tiarap, biaya pertanian yang semakin mahal dan pada saat dibutuhkan benih sulit didapat/langka dan palsu)? Bagaimanakah NU memikirkan privatisasi air (di mana sumber-sumber air yang ada di desa tidak bisa diakses lagi), kekayaan dan sumberdaya alam yang dieksploitasi oleh orang-orang kota?

Sudahkah NU membangun jaringan pasar dari, oleh dan untuk umat yang bisa membentengi serbuan barang-barang industri dari luar (seperti Koperasi yang pernah dibangun dulu)? Sudahkah NU memperpendek rantai-rantai perdagangan yang eksploitatif dan rawan pungli? Sudahkah NU membangun sistem komunikasi untuk melawan pencitraan modernisasi yang telah merasuk dalam kehidupan umat? Semua itu tentunya harus dibangun dengan menghidupkan dan mengaktifkan mesin organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting dan didasarkan pada nilai-nilai Aswaja.

[]